



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dan adanya kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap Visi Misi Walikota terpilih 2025-2030, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau subkegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.

7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

1. Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.
2. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
3. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

Pasal 3

1. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan
BAB III : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV : Penutup
2. Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025.
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025.
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025.
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025.
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025.
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025.
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025.
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025.
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025.
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025.
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025.
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025.
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025.
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025.

26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025.
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025.
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Juli 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam lampiran Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahwa seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, begitu pula berkenaan dengan Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2025. Selain itu Pemerintah Kota Blitar juga terus melanjutkan pembangunan diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang selaras dengan tema sebelumnya yaitu: “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”. Prioritas kebijakan selain terkait dengan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2025, juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2024 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2025 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025;
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2025.

2

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional. Dokumen ini juga menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat, Kasi-kasi dan seluruh staf Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

20. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) PD adalah dokumen perubahan perencanaan kerja suatu Perangkat Daerah dalam tahun berjalan yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan dokumen Perubahan RENJA PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga tetap berpedoman pada pencapaian target RENSTRA PD dan usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau;
2. Keadaan yang menyebabkan sald anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025;
2. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024;
3. Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Visi Misi Walikota Blitar Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Perubahan dan penyesuaian tersebut tertuang dalam Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2025 . Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (PRKA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD (R PAPBD) Kota Blitar Tahun 2025 .

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 ini adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2025 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2025. Adapun tujuan di susunnya Perubahan Renja ini adalah :

1. Penyempurnaan rencana kerja tahun berjalan agar berjalan lebih optimal sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2024 .
3. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS P tahun 2024 dalam rangka penyusunan PAPBD Perubahan Tahun 2024 .

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan

Memuat perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya serta Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN
2025

Capaian target Program dan Kegiatan sampai pada triwulan I tahun 2025 pada umumnya masih rendah, karena adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Walaupun demikian pelaksanaan program dan kegiatan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga indikator tujuan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tingkat capaian target indikator program dan kegiatan dalam Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 secara singkat sebagai berikut :

Tabel. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	15.82	389.017.415,00			5.57	299.113.900,00	0.00	23.637.250,00	0	23.637.250,00	0	23.637.250,00	0	7.9	0	6.1	
				Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	6.9				15.82	299.113.900,00	0.00	23.637.250,00	0	23.637.250,00	0	23.637.250,00	0	7.9	0	6.1	
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	38.58	133.378.700,00			35.61	138.375.300,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1	81.230.300,00			2	86.227.500,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	52.148.400,00			5	52.147.800,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	3.26	154.954.878,00			2.67	160.738.600,00	0.00	23.637.250,00	0	23.637.250,00	0	23.637.250,00	0	14.7	0	15.3	
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00			1	5.787.800,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0.0	0.0	

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	120.000.128,00			1	119.996.200,00	1.00	23.637.250,00	1	23.637.250,00	1	23.637.250,00	100	19.7	100	19.7	
		3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		0,00			40	34.954.600,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0.0	0.0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	33,3	6,6			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	0	7,4			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan	35.267	149.072.725,00			34918	110.974.300,00	0.00	25.828.600,00	0	25.828.600,00	0	25.828.600,00	0	23.3	0	17.3	
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	43.48	25.622.200,00			34.78	25.622.200,00	0.00	1.635.600,00	0	1.635.600,00	0	1.635.600,00	0	6.4	0	6.4	
		3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		0,00			2	25.622.200,00	0.00	1.635.600,00	0	1.635.600,00	0	1.635.600,00	0	6.4	0.0	0.0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	6,4			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangka t Daerah Penanggu ng jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	19.00	7.584.018.899,00			18.8	85.352.100,00	0.00	24.193.000,00	0	24.193.000,00	0	24.193.000,00	0	28.3	0	0.3	
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	55.352.100,00			10	55.352.100,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10	7.528.666.799,00			20	30.000.000,00	20.00	24.193.000,00	20	24.193.000,00	20	24.193.000,00	100	80,6	200	0.3	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	50	40,3			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	0	17,4			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia	29.03	331.854.721,00			74	538.877.200,00	6.90	125.229.900,00	6.9	125.229.900,00	6.9	125.229.900,00	9.3	23.2	23.8	37.7	
				Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak		331.854.721,00			98.25	538.877.200,00	0.00	125.229.900,00	0	125.229.900,00	0	125.229.900,00	0	23.2	0.0	37.7	
				Persentase pengawasan peredaran obat hewan		331.854.721,00			55	538.877.200,00	3.45	125.229.900,00	3.45	125.229.900,00	3.45	125.229.900,00	6.3	23.2	0.0	37.7	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	115.845.600,00			80	448.050.000,00	0	109.794.800,00	0	109.794.800,00	0	109.794.800,00	0	24,5	0	94,8	
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	1	65.842.900,00			2	373.050.000,00	1.00	108.640.000,00	1	108.640.000,00	1	108.640.000,00	50	29.1	100	165	

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangka t Daerah Penanggu ng jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
			dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian	1	50.002.700,00			1	75.000.000,00	0	1.154.800,00	0	1.154.800,00	0	1.154.800,00	0	1,5	0	2,3	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	25	15,3			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	50,00	53.535.700,00			40	57.675.700,00	10,00	15.435.100,00	10	15.435.100,00	10	15.435.100,00	25	26,8	20	28,8	
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4	53.535.700,00			3	57.675.700,00	1	15.435.100,00	1	15.435.100,00	1	15.435.100,00	33,3	26,8	25	28,8	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	33,3	26,8			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100,00	32.850.500,00			100	28.409.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,0	
		3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2	23.928.700,00			2	19.587.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,0	
		3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	8.921.800,00			1	8.821.700,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	70	4.792.200,00			65	4.742.000,00	61,5	0,00	61,5	0,00	61,5	0,00	94,6	0	87,9	0	

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
		3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1	4.792.200,00			1	4.742.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	100	0	100	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	100	0			
Predikat kinerja																	Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	29,9	12,8			
Predikat kinerja																	Sangat rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	100	2.753.949.659,00			52,42	675.837.292,00	0,00	11.535.200,00	0	11.535.200,00	0	11.535.200,00	0	1,7	0	0,4	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)		2.753.949.659,00			100	675.837.292,00	0,00	11.535.200,00	0	11.535.200,00	0	11.535.200,00	0	1,7	0,0	0,4	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	100	37.288.400,00			100	98.050.000,00	100	2.160.000,00	100	2.160.000,00	100	2.160.000,00	100	2,2	100	5,8	
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	2.120.000,00			1	84.400.000,00	1	2.160.000,00	1	2.160.000,00	1	2.160.000,00	100	2,6	100	101,9	
		3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		0,00			1	13.650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	50	1,3			
Predikat kinerja																	Sangat rendah				
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia	90	1.572.498.620,00			70,33	577.787.292,00	0	9.375.200,00	0	9.375.200,00	0	9.375.200,00	0	1,6	0	0,6	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan	70,05	1.572.498.620,00			80	577.787.292,00	0	9.375.200,00	0	9.375.200,00	0	9.375.200,00	0	1,6	0	0,6	

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	611.250.000,00			3	4.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0,00			1	98.827.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0,00			3	85.247.592,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5	611.250.000,00			3	203.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3	349.998.620,00			3	185.012.200,00	3,00	9.375.200,00	3	9.375.200,00	3	9.375.200,00	100	5,1	100	2,7	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	20	1			
Predikat kinerja																	Sangat rendah				
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	33,3	1,8			
Predikat kinerja																	Sangat rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	100	750.000.000,00			48	241.123.700,00	12,00	36.509.700,00	12	36.509.700,00	12	36.509.700,00	25	15,1	12	4,9	
				Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	72,22	750.000.000,00			100	241.123.700,00	0,00	36.509.700,00	0	36.509.700,00	0	36.509.700,00	0	15,1	0	4,9	
				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	52	750.000.000,00			61,11	241.123.700,00	0,00	36.509.700,00	0	36.509.700,00	0	36.509.700,00	0	15,1	0	4,9	

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0.00	41.055.400,00			0	49.134.800,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0.0	0.0	
		3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	30	41.055.400,00			42	49.134.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	71.00	146.104.940,00			69	153.696.300,00	0.00	36.509.700,00	0	36.509.700,00	0	36.509.700,00	0	23.8	0	25	
		3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1	29.015.850,00			1	26.812.100,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	100	0	100	0	
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4	117.089.090,00			5	126.884.200,00	0	36.509.700,00	0	36.509.700,00	0	36.509.700,00	0	28,8	0	31,2	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	50	14,4			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	48.00	25.871.500,00			44	27.264.700,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	8.619.300,00			1	8.811.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	20	17.252.200,00			21	18.453.700,00	5.00	0,00	5	0,00	5	0,00	23.8	0	25	0.0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	11,9	0			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17		
			Predikat kinerja																				
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang terlaksana	100.00	12.313.800,00			100	11.027.900,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0			
		3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8	12.313.800,00			8	11.027.900,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	12,5	0	12,5	0			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	12,5	0					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	0	5,9					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																							
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100	111.206.667,00			100	17.675.000,00	100.00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0	100	0.0			
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	13	16.041.000,00			13	17.675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0			
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100	16.041.000,00			100	17.675.000,00	31.50	0,00	31.5	0,00	31.5	0,00	31.5	0	31.5	0.0			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	31,5	0					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	0	0					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																							

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	53.85	62.223.588,00			50	18.124.300,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	30.00	28.012.400,00			20	7.649.400,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1	28.012.400,00			1	7.649.400,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1.00	5.524.800,00			1	5.524.300,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2	5.524.800,00			2	5.524.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1.00	5.798.050,00			1	4.950.600,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1	5.798.050,00			1	4.950.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0			

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
Predikat kinerja																Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																0	0				
Predikat kinerja																Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	38.89	288.889.51 0,00			33.33	1.561.272.2 00,00	0.00	15.250.00 0,00	0	15.250.000, 00	0	15.250.0 00,00	0	1	0	5.3	
				Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	23.81	288.889.51 0,00			19.05	1.561.272.2 00,00	0.00	15.250.00 0,00	0	15.250.000, 00	0	15.250.0 00,00	0	1	0	5.3	
				Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	0.93	288.889.51 0,00			0.93	1.561.272.2 00,00	0.00	15.250.00 0,00	0	15.250.000, 00	0	15.250.0 00,00	0	1	0	5.3	
		3.27.07.2. 01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	50	2.030.669. 968,00			45	1.561.272.2 00,00	0	15.250.00 0,00	0	15.250.000, 00	0	15.250.0 00,00	0	1	0	0.8	
		3.27.07.2. 01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	72.465.800 ,00			3	6.324.600,0 0	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		3.27.07.2. 01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21	1.953.530. 168,00			27	1.550.000.0 00,00	10.00	15.250.00 0,00	10	15.250.000, 00	10	15.250.0 00,00	37	1	47. 6	0.8	
		3.27.07.2. 01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	4.674.000, 00			3	4.947.600,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																12,3	0,3				
Predikat kinerja																Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																0	1				
Predikat kinerja																Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6, adanya tambahan alokasi DAK untuk BOP Penyuluh pertanian																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																						
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.75	9.451.053.317,00			81.5	9.256.291.176,00	87.02	2.039.348.359,00	87.02	2.039.348.359,00	87.02	2.039.348.359,00	106.8	22	106.4	21.6		
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100.00	77.824.700,00			100	101.944.500,00	25.00	1.620.000,00	25	1.620.000,00	25	1.620.000,00	25	1.6	25	2.1		
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	10.090.400,00			5	9.927.200,00	1	1.620.000,00	1	1.620.000,00	1	1.620.000,00	20	16,3	20	16,1		
		2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	67.734.300,00			4	92.017.300,00	3.00	0,00	3	0,00	3	0,00	75	0	75	0.0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	47,5	8,2				
Predikat kinerja																	Sangat Rendah					
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100.00	6.406.155.364,00			100	6.899.955.509,00	25.00	1.630.773.538,00	25	1.630.773.538,00	25	1.630.773.538,00	25	23.6	25	25.5		
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	6.403.385.364,00			56	6.897.185.509,00	56	1.630.773.538,00	56	1.630.773.538,00	56	1.630.773.538,00	100	23,6	100	25,5		
		2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	2.770.000,00			5	2.770.000,00	2.00	0,00	2	0,00	2	0,00	40	0	40	0.0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	70	11,8				
Predikat kinerja																	Sedang					
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100.00	125.090.472,00			100	127.352.300,00	25.00	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0	25	0.0		

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
		2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	38.000.000 ,00			1	37.500.000, 00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98	87.090.472 ,00			98	89.852.300, 00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100.00	352.059.90 0,00			100	327.204.30 0,00	25.00	46.415.00 0,00	25	46.415.000, 00	25	46.415.0 00,00	25	14. 2	25	13.2	
		2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.859.300, 00			1	6.849.800,0 0	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	46.266.100 ,00			2	41.799.000, 00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	25.243.000 ,00			3	24.692.000, 00	2	19.037.50 0,00	2	19.037.500, 00	2	19.037.5 00,00	66,7	77, 1	66, 7	75,4	
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20.181.000 ,00			4	20.240.000, 00	2	4.960.500 ,00	2	4.960.500,0 0	2	4.960.50 0,00	50	24, 5	200	24,6	
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	23.278.000 ,00			1	23.278.000, 00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	14.940.000 ,00			72	14.940.000, 00	18.00	2.490.000 ,00	18	2.490.000,0 0	18	2.490.00 0,00	25	16. 7	25	16.7	
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56	199.980.00 0,00			56	180.093.00 0,00	18	19.927.00 0,00	18	19.927.000, 00	18	19.927.0 00,00	32,1	11, 1	32, 1	10	
		2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	15.312.500 ,00			1	15.312.500, 00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	21,7	16, 2			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	100.00	23.418.600 ,00			100	89.989.300, 00	25.00	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0	25	0.0	

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangka t Daerah Penanggu ng jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan sesuai kebutuhan																	
		2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00			1	36.119.300,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00			1	18.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	23.418.600,00			1	22.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00			4	13.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	1.433.345.535,00			100	1.453.902.195,00	25	349.591.146,00	25	349.591.146,00	25	349.591.146,00	25	24	25	24,4	
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216	194.617.200,00			216	164.617.200,00	54,00	56.983.530,00	54	56.983.533,00	54	56.983.533,00	25	34,6	25	29,3	
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	1.238.728.335,00			13	1.289.284.995,00	4,00	292.607.613,00	4	292.607.613,00	4	292.607.613,00	30,8	22,7	30,8	23,6	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	27,9	28,7			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100,00	257.280.739,00			100	255.943.072,00	25,00	10.948.675,00	25	10.948.675,00	25	10.948.675,00	25	4,3	25	4,3	
		2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	110.808.000,00			30	109.156.100,00	0,00	5.948.675,00	0	5.948.675,00	0	5.948.675,00	0	5,4	0	5,4	
		2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	58.171.900,00			32	58.030.400,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	3,1	8,6	3,1	8,6	

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
			Mesin Lainnya																		
		2.09.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		0,00			1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	88.300.839,00			2	63.756.572,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0,8	3,5			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	25	9,7			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	2200	211.968.561,00			2200	151.585.100,00	0.00	29.003.300,00	0	29.003.300,00	0	29.003.300,00	0	19,1	0	13,7	
				Angka konsumsi energi per kapita	2133,34	211.968.561,00			2150	151.585.100,00	0.00	29.003.300,00	0	29.003.300,00	0	29.003.300,00	0	19,1	0	13,7	
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100.00	2.923.600,00			100	28.840.000,00	0.00	12.909.200,00	0	12.909.200,00	0	12.909.200,00	0	44,8	0	441,6	
		2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		0,00			3	25.916.800,00	1.00	12.909.200,00	1	12.909.200,00	1	12.909.200,00	33.3	49,8	0.0	0.0	
		2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		0,00			1	2.923.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	16,7	24,9			

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangka t Daerah Penanggu ng jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+ 12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein	57.00	111.851.900,00			57	122.745.100,00	0.00	16.094.100,00	0	16.094.100,00	0	16.094.100,00	0	13.1	0	14.4	
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2	58.600.100,00			4	69.493.400,00	1.00	16.094.100,00	1	16.094.100,00	1	16.094.100,00	25	23.2	50	27.5	
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	53.251.800,00			1	53.251.700,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	12,5	11,6			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	0	28,9			
Predikat kinerja																	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	16.00	82.654.425,00			15.24	53.203.600,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0.0	
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2	53.205.700,00			2	53.203.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota		0,00			2	53.203.600,00	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0.0	0.0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0			

No	Sasaran	Kode	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangka t Daerah Penanggu jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 =(13/8) x 100%		16 = (14/6) x 100%		17	
Predikat kinerja																		Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	0			
Predikat kinerja																		Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																						
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar	100	14.586.075 ,00			100	10.249.700, 00	0.00	9.499.700 ,00	0	9.499.700,0 0	0	9.499.70 0,00	0	92, 7	0	65.1		
		2.09.05.2. 01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	100.00	10.250.200 ,00			100	10.249.700, 00	0.00	9.499.700 ,00	0	9.499.700,0 0	0	9.499.70 0,00	0	92, 7	0	92.7		
		2.09.05.2. 01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	10.250.200 ,00			1	10.249.700, 00	0.00	9.499.700 ,00	0	9.499.700,0 0	0	9.499.70 0,00	0	92, 7	0	92.7		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	92, 7			
Predikat kinerja																		Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	92, 7			
Predikat kinerja																		Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																						

Dari tabel evaluasi diatas rata-rata capaian program masih sangat rendah yaitu sebesar 11,91% dengan realisasi keuangan sebesar 17,17% dari total pagu RKPD. Untuk capaian kinerja masing – masing program sampai dengan tribulan I adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan tribulan 1 sebesar 87,02 point atau 106,8% (dari target 81,5 point dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Realisasi keuangan sebesar 22,00%. Sedangkan untuk realisasi rata-rata capaian kinerja per kegiatan sebesar 25% dan rata-rata realisasi keuangan per kegiatan sebesar 9,7%.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Capaian indikator kinerja angka konsumsi energi perkapita dan angka ketersediaan energi perkapita sampai dengan trubulan 1 masih 0% dengan realisasi keuangan sebesar 19,1%. Hal ini disebabkan penghitungan indikator kinerja menunggu hasil analisa konsumsi pangan yang dilaksanakan pada tribulan 4. Demikian juga untuk capaian kinerja kegiatan sehingga rata-rata capaian kinerja per kegiatan masih 0% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 28,9%.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Capaian indikator kinerja persentase balita rawan pangan yang tertangani sampai dengan tribulan 1 sebesar 0% atau mencapai 0% dari target kinerja 15,42%. Adanya perubahan kebijakan dalam sasaran penanganan rawan pangan lebih diarahkan untuk penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat rentan rawan pangan sesuai dengan program prioritas Walikota Blitar, sehingga diperlukan penyesuaian melalui proses P-APBD.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Capaian indikator kinerja tingkat keamanan pangan segar (%) sampai dengantribulan 2 adalah sebesar 100% atau 100% dari target kinerja (Sangat Tinggi) dengan realisasi anggaran sebesar 100% (sangat Tinggi). Untuk rata-rata capaian kinerja perkegiatan sebesar 100% dan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi.
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Capaian indikator persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas sampai tribulan 1 sebesar 14,47% atau sebesar 91,47% dari target tahun 2025. Capaian indikator persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis sampai dengan tribulan 1 masih 0% (sangat rendah) karena menunggu hasil monitoring yang akan dilaksanakan pada tribulan 4. Realisasi anggaran untuk program pengelolaan perikanan budidaya sampai dengan tribulan 1 sebesar 37,65%. Sedangkan untuk capaian rata-rata kinerja per kegiatan sebesar 0% dengan rata-rata realisasi anggaran per kegiatan sebesar 7,4%.
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Capaian kinerja volume penjualan hasil olahan perikanan sebesar 0% dari target tahun 2025 dengan realisasi anggaran sebesar 23,3%. Hal ini disebabkan penghitungan volume penjualan hasil olahan perikanan menunggu hasil monitoring kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilaksanakan pada tribulan 4 (bulan Oktober). Rata-rata capaian realisasi per kegiatan dalam program tersebut juga masih 0% karena indikator kinerja kegiatan dihitung pada akhir tahun. Sedangkan untuk rata-rata capaian realisasi anggaran perkegiatan sebesar 17,4% yang merupakan realisasi anggaran sub kegiatan.
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Capaian kinerja persentase sarana pertanian yang tersedia, persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak dan persentase pengawasan obat hewan sampai dengan tribulan 1 masih 0%.

Hal ini disebabkan keseluruhan kinerja baru dapat dihitung pada akhir tahun menunggu hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan. Sedangkan untuk realisasi anggaran program telah mencapai 23,2% dari pagu anggaran program dalam RKPD. Sedangkan untuk rata-rata realisasi kinerja per kegiatan sebesar 29,9% dan rata-rata capaian realisasi anggaran per kegiatan sebesar 12,8% yang menunjukkan beberapa sub kegiatan dalam program telah dilaksanakan.

8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Capaian indikator kinerja persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik sebesar 0% dan Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) sebesar 100%. Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik baru dapat dihitung pada akhir tahun setelah semua pekerjaan fisik konstruksi selesai. Sedangkan untuk realisasi anggaran program sampai dengan tribulan 1 sebesar 1,7%. Rata-rata capaian kinerja per kegiatan sebesar 33,3%. Beberapa indikator kegiatan baru bisa dihitung pada akhir tahun. Sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran per kegiatan sebesar 1,8% yang menunjukkan beberapa sub kegiatan telak dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Capaian persentase penyakit hewan ternak yang tertangani sampai dengan tribulan 1 sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar dan persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV) baru dapat dihitung pada akhir tahun. Capaian realisasi anggaran program sampai dengan tribulan 1 telah mencapai 15,1%. Rata-rata capaian kinerja per kegiatan masih 0% (sangat rendah) karena indikator kinerja kegiatan baru dapat dihitung setelah keseluruhan sub kegiatan telah dilaksanakan. Akan tetapi rata-rata capaian realisasi anggaran telah mencapai 5,9% yang menunjukkan beberapa sub kegiatan telah dilaksanakan.
10. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Capaian indikator kinerja persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur sampai dengan tribulan 1 masih 0% dengan realisasi anggaran sebesar 0%. Hal ini disebabkan masih perlu adanya penyesuaian pada aktivitas sub kegiatan menyesuaikan dengan program prioritas terbaru.
11. Program Perizinan Usaha Pertanian
Capaian indikator kinerja persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis sampai dengan tribulan 1 masih 0% dengan realisasi anggaran sebesar 0%. Rata-rata capaian kinerja per kegiatan sebesar 0%. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka program perizinan usaha pertanian akan dilaksanakan pada tribulan 3 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
12. Program Penyuluhan Pertanian
Capaian indikator program penyuluhan pertanian sampai dengan tribulan 1 masih sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar 1%. Demikian juga untuk rata-rata capaian indikator kinerja per kegiatan juga masih sebesar 0%. Hal ini disebabkan indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian yang dilaksanakan pada akhir tahun. Sedangkan rata-rata capapain realisasi anggaran per kegiatan mencapai 1% yang menunjukkan bahwa beberapa aktivitas kegiatan dalam program penyuluhan pertanian telah dilaksanakan. Pada tribulan 1 lebih diprioritaskan untuk persiapan kegiatan dan pengadaan sarana pelayanan di BPP masing-masing kecamatan.

Secara umum faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kegiatan yang terdampak efisiensi anggaran.
2. Penyesuaian kegiatan dengan visi misi serta program prioritas Walikota Blitar Tahun 2025-2029.
3. Kegiatan yang bersumber dari Dana DAK belum bisa dilaksanakan karena menunggu petunjuk teknis pelaksanaan.
4. Adanya perubahan aktivitas, lokasi maupun sasaran kegiatan menyesuaikan dengan fokus kegiatan di daerah maupun jadwal kegiatan dari propinsi/kementerian
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menyesuaikan dengan penyelesaian proses pengadaan sesuai dengan e-katalog versi 6.
6. Beberapa indikator program dan kegiatan hanya bisa dihitung pada akhir tahun anggaran. Sehingga realisasi capaian per triwulan hanya bisa dievaluasi dari realisasi kinerja sub kegiatan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para penanggungjawab kegiatan dengan segenap aparaturnya dan stake holder Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2. Penyesuaian dan perbaikan rencana kegiatan dan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan penyesuaian baik berupa jumlah anggaran maupun target kinerja sesuai dengan kondisi, sumber daya dan urgensi agar lebih mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Blitar. Perubahan Renja Tahun 2025 ini harus sudah selaras dan mengakomodir Inpres No. 1 Tahun 2025 serta hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dan evaluasi Sakip Tahun 2024.

Visi Walikota Tahun 2025-2029 adalah Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan. Visi ini diterjemahkan dalam 5 misi yaitu :

1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius, dan Nasionalis;
2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera;
3. Mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintah yang Berbasis *Smart Governance*;
4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter;
5. Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya masuk dalam misi ke 5 yaitu mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi. Dalam misi ke 5 terdapat beberapa program prioritas daerah yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan bisa diakomodir dalam P-Renja 2025 sebagaimana berikut :

1. Bantuan peralatan dan fasilitas pendukung di bidang pertanian.
2. Memfasilitasi dan pendamping pertanian model urban farming dan pola tanam organik.
3. Memberikan kemudahan perijinan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan juga memperhatikan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang telah ditindaklanjuti dengan Perwali No. 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sedangkan untuk saran dan langkah perbaikan dalam LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 yang diakomodir dalam P Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan diversifikasi produk hasil pertanian	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa

Selain itu, dalam upaya peningkatan penerapan akuntabilitas kinerja, penyusunan Perubahan Renja ini juga mengakomodir hasil Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 yaitu dengan melakukan perbaikan target kinerja dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

3.1 Rekapitulasi Perubahan Renja Tahun 2024

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja OPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, Visi Misi Walikota Blitar, Inpres No. 1 Tahun 2025, LKjIP 2024 serta hasil evaluasi SAKIP 2024, maka ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 terdapat 12 program, 30 kegiatan dan 65 sub kegiatan. Rekapitulasi perubahan sub kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof					Keterangan
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			9.519.93 9.645,00	9.307.787. 250,00	- 212.152.395,00		
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5 Angka	81,5 Angka	9.304.90 1.245,00	9.130.739. 250,00	- 174.161.995,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	106.940. 600,00	16.809.400 ,00	-90.131.200,00	
2	9	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	6.490.90 0,00	2.810.000, 00	-3.680.900,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	1	2. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan	100.449. 700,00	13.999.400 ,00	-86.450.300,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	100 Persen	6.899.95 5.509,00	6.899.955. 509,00	0,00	
2	9	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bul an	56 Orang/bulan	6.897.18 5.509,00	6.897.185. 509,00	0,00	Tetap
2	9	1	2. 02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2.770.00 0,00	2.770.000, 00	0,00	Tetap
2	9	1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	114.042. 300,00	69.654.641 ,00	#####	
2	9	1	2. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	37.500.0 00,00	10.000.000 ,00	-27.500.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	1	2. 05	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	98 Orang	98 Orang	76.542.3 00,00	59.654.641 ,00	-16.887.659,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof				Keterangan	
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
						Perundang- Undangan						
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	100 Persen	331.196. 220,00	248.179.04 0,00	-83.017.180,00	
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.849.80 0,00	11.805.000 ,00	4.955.200,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	41.799.0 00,00	41.799.000 ,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	24.692.0 00,00	24.692.000 ,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	28.490.0 00,00	28.490.000 ,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.278.0 00,00	14.705.620 ,00	-8.572.380,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen	14.940.0 00,00	14.940.000 ,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	56 Laporan	175.947. 420,00	96.547.420 ,00	-79.400.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.200.0 00,00	15.200.000 ,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 Persen	100 Persen	97.489.3 00,00	144.863.34 4,00	47.374.044,00	
2	9	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	36.119.3 00,00	36.119.300 ,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	18.240.0 00,00	18.240.000 ,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	22.630.0 00,00	61.184.744 ,00	38.554.744,00	Realokasi untuk pengadaan printer dan scanner
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	20.500.0 00,00	29.319.300 ,00	8.819.300,00	Tetap
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	persentase penyediaan jasa penunjang	100 Persen	100 Persen	1.508.36 2.244,00	1.508.362. 244,00	0,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof				Keterangan	
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
					Pemerintahan Daerah	urusan sesuai standar						
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	216 Laporan	193.255.664,00	193.255.664,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	1.315.106.580,00	1.315.106.580,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 Persen	100 Persen	246.915.072,00	242.915.072,00	-4.000.000,00	
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	100.128.100,00	100.128.100,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	58.030.400,00	54.030.400,00	-4.000.000,00	rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Tetap
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	63.756.572,00	63.756.572,00	0,00	Tetap
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka konsumsi energi per kapita	2150 kkal/kap/hari	2150 kkal/kap/hari	151.585.100,00	123.513.900,00	-28.071.200,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
						Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	2200 kkal/kap/hari	2200 kkal/kap/hari				
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100 angka	100 angka	28.840.000,00	44.807.300,00	15.967.300,00	
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	2 Unit	25.916.800,00	43.634.100,00	17.717.300,00	Realokasi penambahan anggaran untuk gerakan pangan terjangkau
2	9	3	2.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	2 Dokumen	2.923.200,00	1.173.200,00	-1.750.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof					Keterangan
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein	57 gr/kap/thari	57 gr/kap/thari	122.745.100,00	78.706.600,00	-44.038.500,00	
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	2 Laporan	69.493.400,00	27.806.600,00	-41.686.800,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	53.251.700,00	50.900.000,00	-2.351.700,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	62 Persen	21 Persen	53.203.600,00	39.299.100,00	-13.904.500,00	Perubahan sasaran penanganan rawan pangan dan rasionalisasi jumlah pemberian bantuan bahan pangan
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2 kali	2 kali	53.203.600,00	39.299.100,00	-13.904.500,00	
2	9	4	2.02	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan	53.203.600,00	39.299.100,00	-13.904.500,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar	100 Persen	100 Persen	10.249.700,00	14.235.000,00	3.985.300,00	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	100 Persen	100 Persen	10.249.700,00	14.235.000,00	3.985.300,00	
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.249.700,00	14.235.000,00	3.985.300,00	Realokasi penambahan anggaran untuk penyesuaian harga uji produk pangan segar
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				410.088.200,00	393.728.756,00	-16.359.444,00	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	15.82 Persen	17,21 Persen	299.113.900,00	294.117.656,00	-4.996.244,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024 dan rasionalisasi efisiensi anggaran
						Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	22 Persen	26,31 Persen				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof				Keterangan	
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
3	2	4	2.		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	60 persen	76,01 Persen	138.375. 300,00	138.425.30 0,00	50.000,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024 dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	4	2.	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	2 Kelompok	86.227.5 00,00	88.515.900 ,00	2.288.400,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	4	2.	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	10 Kelompok	52.147.8 00,00	49.909.400 ,00	-2.238.400,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	4	2.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	5 Persen	5 Persen	160.738. 600,00	155.692.35 6,00	-5.046.244,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	4	2.	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.787.80 0,00	3.627.800, 00	-2.160.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	4	2.	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	119.996. 200,00	117.842.55 6,00	-2.153.644,00	Realokasi penambahan anggaran untuk pembangunan sumur di Sukhoi
3	2	4	2.	1 0	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Unit	50 Unit	34.954.6 00,00	34.222.000 ,00	-732.600,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan	34918 Juta Rupiah	38.018 Juta Rupiah	110.974. 300,00	99.611.100 ,00	-11.363.200,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024 dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	6	2.		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	34,78 Persen	34,78 Persen	25.622.2 00,00	18.439.200 ,00	-7.183.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	6	2.	2	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	25.622.2 00,00	18.439.200 ,00	-7.183.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof				Keterangan	
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
					Skala Usaha dan Risiko	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	21,5 kg/ kapita/tahun	21,5 kg/ kapita/tahun	85.352.100,00	81.171.900,00	-4.180.200,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton	10 Ton	55.352.100,00	56.741.900,00	1.389.800,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	30.000.000,00	24.430.000,00	-5.570.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.192.122.682,00	3.582.284.082,00	390.161.400,00	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia	74 Persen	74 Persen	315.604.900,00	334.470.800,00	18.865.900,00	
						Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar	55 Persen	55 Persen				
						Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	97,90 persen	97,90 persen				
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	80 Persen	100 Persen	224.778.000,00	227.373.000,00	2.595.000,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	203.874.000,00	192.674.000,00	-11.200.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	20.904.000,00	34.699.000,00	13.795.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase peternak yang dibina	40 Persen	46 Persen	57.675.700,00	78.924.700,00	21.249.000,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024 dan rasionalisasi efisiensi anggaran

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof				Keterangan	
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
					Kewenangan Kabupaten/Kota							
3	2	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	3 Dokumen	57.675.700,00	78.924.700,00	21.249.000,00	Realokasi penambah an anggaran untuk rehab kandang demplot kambing
3	2	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	28.409.200,00	23.930.100,00	-4.479.100,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Ta naman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	2 Laporan	19.587.500,00	18.827.000,00	-760.500,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	8.821.700,00	5.103.100,00	-3.718.600,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	2	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	95.3 Persen	95.3 Persen	4.742.000,00	4.243.000,00	-499.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	2	2.04	1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	4.742.000,00	4.243.000,00	-499.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	69.7 Persen	70 Persen	640.233.292,00	1.032.418.992,00	392.185.700,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024 dan realokasi anggaran
						Persentase produk RPH yang dijamin ASUH	100 Persen	100 Persen				
3	2	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	100 Persen	100 Persen	69.946.000,00	13.000.000,00	-56.946.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
3	2	3	2.01	16	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	1 Dokumen	1 Dokumen	67.746.000,00	10.800.000,00	-56.946.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia	70.33 Persen	71,50 Persen	570.287.292,00	1.019.418.992,00	449.131.700,00	Perubahan target kinerja sesuai

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof				Keterangan	
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
						Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan	80 Persen	80 Persen				capaian tahun 2024
3	2	3	2.	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	4.950.000,00	225.431.700,00	220.481.700,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	3	2.	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	3 Unit	98.827.500,00	98.827.500,00	0,00	Tetap
3	2	3	2.	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	85.247.592,00	85.247.592,00	0,00	Tetap
3	2	3	2.	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	203.750.000,00	441.500.000,00	237.750.000,00	Penambahan anggaran untuk pembangunan JIUT
3	2	3	2.	15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	3 Unit	177.512.200,00	168.412.200,00	-9.100.000,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	100 persen	100 persen	240.916.700,00	229.588.700,00	-11.328.000,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024 dan realokasi anggaran
						Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	61,11 persen	61,11 persen				
						Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	48 persen	65 persen				
3	2	4	2.	01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0 Angka	0 Angka	63.297.800,00	45.589.300,00	-17.708.500,00	
3	2	4	2.	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	42 Orang	42 Orang	63.297.800,00	45.589.300,00	-17.708.500,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	4	2.	03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	90 Persen	90 Persen	139.326.300,00	148.592.700,00	9.266.400,00	
3	2	4	2.	03	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	1 Laporan	26.812.100,00	25.679.500,00	-1.132.600,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	4	2.	03	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan	5 Laporan	112.514.200,00	122.913.200,00	10.399.000,00	Realokasi anggaran untuk pembelian vaksin dan obat hewan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof				Keterangan	
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
3	2	4	2.		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	88 Persen	89,14 Persen	27.264.700,00	25.930.000,00	-1.334.700,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024 dan realokasi anggaran
3	2	4	2.	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen	8.811.000,00	8.811.000,00	0,00	Tetap
3	2	4	2.	5	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	18.453.700,00	17.119.000,00	-1.334.700,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	4	2.		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	11.027.900,00	9.476.700,00	-1.551.200,00	
3	2	4	2.	3	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8 Unit	8 Unit	11.027.900,00	9.476.700,00	-1.551.200,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100 Persen	100 Persen	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	
3	2	5	2.		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	17 Persen	17 Persen	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	
3	2	5	2.	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	100 Ha	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	Tetap
3	2	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	42,85 persen	42,85 persen	18.124.300,00	6.352.100,00	-11.772.200,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024 dan rasionalisasi efisiensi anggaran
						Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	53,1 persen	53,1 persen				
3	2	6	2.		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	-	57 pelaku usaha	7.649.400,00	1.375.000,00	-6.274.400,00	
3	2	6	2.	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	7.649.400,00	1.375.000,00	-6.274.400,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatof				Keterangan	
							Target 2025		Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
3	2	6	2.		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang dikeluarkan	-	1 Rekomendasi	5.524.300,00	3.487.200,00	-2.037.100,00	
3	2	6	2.	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2 Laporan	2 Laporan	5.524.300,00	3.487.200,00	-2.037.100,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	6	2.	03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4.950.600,00	1.489.900,00	-3.460.700,00	
3	2	6	2.	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	4.950.600,00	1.489.900,00	-3.460.700,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	0,93 persen	2 persen	1.959.568.490,00	1.961.778.490,00	2.210.000,00	Perubahan target kinerja sesuai capaian tahun 2024 dan realokasi efisiensi anggaran
						Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	19,05 persen	19,05 persen				
						Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	33,33 persen	41,6 persen				
3	2	7	2.	01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	45 Persen	45 Persen	1.959.568.490,00	1.961.778.490,00	2.210.000,00	
3	2	7	2.	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	3 Unit	6.324.600,00	5.500.000,00	-824.600,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	7	2.	01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Unit	41 Unit	1.948.296.290,00	1.883.131.290,00	-65.165.000,00	Rasionalisasi efisiensi anggaran dan realokasi untuk pelatihan Produk hortikultura (melon).
3	2	7	2.	01	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	3 Unit	4.947.600,00	187.200,00	-4.760.400,00	Realokasi dan rasionalisasi efisiensi anggaran
3	2	7	2.	01	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	16 Orang	0	72.960.000,00	72.960.000,00	Dana DAK Pertanian dan Ketahanan Pangan
J U M L A H									13.122.150.527,00	13.283.800.088,00	161.649.561,00	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 21 sub kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2025 yang tidak mengalami perubahan dan terdapat 10 sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran yang berasal dari penambahan anggaran maupun pergeseran. Penambahan pagu anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Rehabilitasi JITU untuk 2 lokasi;
3. Penyediaan peralatan mesin kantor (printer dan scanner) dan alat kelistrikan;
4. Pembuatan sumur bor dan pengadaan pompa air di SUKHOI;
5. Rehabilitasi kandang demplot kambing;
6. Pengadaan vaksin dan obat hewan;
7. Penyesuaian harga uji laboratorium bahan pangan segar;
8. Lomba Masak Ikan Tingkat Kota;
9. Pelatihan Budidaya Hortikultura (Melon);
10. Penyelenggaraan Gerakan Pangan Terjangkau.

Sedangkan sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran sebanyak 34 sub kegiatan. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan :

1. Pergeseran anggaran untuk kegiatan prioritas perangkat daerah yang harus dilaksanakan sesuai visi misi dan program prioritas daerah.
2. Efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025, dimana efisiensi anggaran dilakukan untuk belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas, pakaian, alat tulis kantor, cetak, publikasi/baliho, kajian, kegiatan event daerah.

Pada Perubahan Renja 2025 terdapat perubahan target tujuan dan sasaran sesuai dengan hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024. Perubahan target tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi/Definisi Operasional	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	
					Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan ,keterjangkauan, pemanfaatan pangan) yang dibagi dalam 6 (enam) kategori kelompok wilayah yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (zona hijau menandakan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik).	80,80	75,68	80,80

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi/Definisi Operasional	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	
					Sebelum	Sesudah
		Pangsa Pengeluara n Pangan Per Kapita	Rata-rata pengeluaran untuk pangan per kapita (Rp.) di bagi Rata-rata pengeluaran total per kapita (Rp.) di kalikan 100%	47,4%	42,16%	42,16% Persen
2	Tercukupiny a konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	88,87	87	88,90
3	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam milliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	200,43 milyar rupiah	198,8 milyar rupiah	200,43 milyar rupiah
		Nilai Tukar Petani	NTP = IT/IB X 100 % IT : Indeks Harga Yang Diterima Petani IB : Indeks Harga Yang Harus Dibayar Petani	101,92	102,67	102,67
		Nilai Tukar Pembudida ya Ikan	NTP = ITi/IBi X 100% ITi : Indeks Harga Yang Diterima Pembudidaya Ikan IBi : Indeks Harga Yang Harus Dibayar Pembudidaya Ikan	102,5	101,5	102,5
4	Meningkatny a produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultur a (dalam kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun	173.776,4 0 kwintal	198325, 67 kwintal	220.141, 42 kwintal
		Produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun	104.314,3 2 kwintal	84827,7 2 kwintal	104.320 kwintal
		Produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun	2.503,4 kwintal	2489,33 kwintal	2.510 kwintal
		Produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	Jumlah total produksi ikan hias dalam 1 tahun	4.742.797 kwintal	4.740.86 3 ekor	4.743.00 0 ekor
7.	Meningkatny a pemasaran produk hasil	Nilai produksi Hasil pertanian	Jumlah produksi hasil pertanian (kg) x harga tingkat petani (Rp./Kg.)	115.849.9 72 ribu rupiah	94.025.0 53,58 ribu rupiah	116.429. 221 ribu rupiah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi/Definisi Operasional	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	
					Sebelum	Sesudah
	pertanian dan perikanan	(Ribu Rupiah)				
		Nilai produksi hasil perikanan (Ribu Rupiah)	Nilai produksi hasil perikanan segar + omset usaha produk olahan hasil perikanan. Nilai produksi hasil perikanan segar = Jumlah produksi hasil perikanan (kg) x harga tingkat pembudidaya (Rp./Kg.)	37.829.16 8 ribu rupiah	35.677.6 50,27 ribu rupiah	38.018.3 13 ribu rupiah
8.	Meningkatny a Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/ penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	85,23 (A)	84,73 (A)	85,25 (A)
9.	Meningkatny a Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	85,23 (A)	84,73 (A)	85,25 (A)

Selain itu dalam rangka perbaikan perencanaan dan optimalisasi capaian kinerja sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang tercantum dalam LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024, maka ada 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 7.

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan diversifikasi produk hasil pertanian	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa

Dalam rangka pencapaian target kinerja dilakukan penyesuaian kebijakan yaitu :

1. Peningkatan keterlibatan generasi muda dalam pertanian modern.
2. Peningkatan penggunaan teknologi pertanian untuk mendukung smart farming.

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 8.

PERUBAHAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						12.934.32 7.468,00	13.122.15 0.527,00	13.283.80 0.088,00					16.498.34 0.764,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.471.329. 576,00	9.519.939. 645,00	9.307.787. 250,00					10.841.30 0.529,00				
	2	0 9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						9.471.329. 576,00	9.519.939. 645,00	9.307.787. 250,00					10.841.30 0.529,00				
1	2	0 9	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81.5 Angka	81.5 Angka	9.256.291. 176,00	9.304.901. 245,00	9.130.739. 250,00						10.578.74 5.948,00		
	2	0 9	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	101.944.5 00,00	106.940.6 00,00	16.809.40 0,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Masyaraka t Kota Blitar		113.702.5 87,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokume n	5 Dokume n	9.927.200, 00	6.490.900, 00	2.810.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital		11.719.91 1,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN	
	2	0 9	0 1	2. 01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3 Laporan	92.017.30 0,00	100.449.7 00,00	13.999.40 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			101.982.6 76,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	6.899.955. 509,00	6.899.955. 509,00	6.899.955. 509,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Masyaraka t Kota Blitar		7.608.788. 410,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/b ulan	56 Orang/b ulan	6.897.185. 509,00	6.897.185. 509,00	6.897.185. 509,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			7.605.560. 998,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 1	2. 02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.770.000, 00	2.770.000, 00	2.770.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			3.227.412, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	180.093.0 00,00	175.947.4 20,00	96.547.42 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			199.838.7 08,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN		
	2	0 9	0 1	2. 06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	15.312.50 0,00	15.200.00 0,00	15.200.00 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			20.000.00 0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN		
	2	0 9	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	-			100 Persen	100 Persen	89.989.30 0,00	97.489.30 0,00	144.863.3 44,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Masyaraka t Kota Blitar		0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN		
	2	0 9	0 1	2. 07	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36.119.30 0,00	36.119.30 0,00	36.119.30 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN		
	2	0 9	0 1	2. 07	00 05	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	18.240.00 0,00	18.240.00 0,00	18.240.00 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN		
	2	0 9	0 1	2. 07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																			Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	6 Unit	22.630.00 0,00	22.630.00 0,00	61.184.74 4,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 1	2. 07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	13.000.00 0,00	20.500.00 0,00	29.319.30 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	1.453.902. 195,00	1.508.362. 244,00	1.508.362. 244,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Masyaraka t Kota Blitar		1.401.167. 811,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				216 Laporan	216 Laporan	164.617.2 00,00	193.255.6 64,00	193.255.6 64,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			162.439.4 76,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	1.289.284. 995,00	1.315.106. 580,00	1.315.106. 580,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			1.238.728. 335,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	255.943.0 72,00	246.915.0 72,00	242.915.0 72,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan	Masyaraka t Kota Blitar		591.534.1 12,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Pemerintahan Daerah												Ekonomi Digital				PERTANI AN	
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	109.156.1 00,00	100.128.1 00,00	100.128.1 00,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			178.689.9 94,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	58.030.40 0,00	58.030.40 0,00	54.030.40 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			59.199.25 6,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.00 0,00	25.000.00 0,00	25.000.00 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			30.000.00 0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi				1 Unit	2 Unit	63.756.57 2,00	63.756.57 2,00	63.756.57 2,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			323.644.8 62,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
2	2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka konsumsi energi per kapita Angka ketersediaan energi perkapita/ hari				2200 2150 kkal/kap /hari kkal/kap /hari	2150 2200 kkal/kap /hari kkal/kap /hari	151.585.1 00,00	151.585.1 00,00	123.513.9 00,00							165.314.0 81,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	2 Laporan	69.493.40 0,00	69.493.40 0,00	27.806.60 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			98.549.60 4,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 3	2. 04	00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																	
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	53.251.70 0,00	53.251.70 0,00	50.900.00 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			63.336.26 3,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
3	2	0 9	0 4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani				62 Persen	62 Persen	53.203.60 0,00	53.203.60 0,00	39.299.10 0,00							82.654.42 5,00	
	2	0 9	0 4	2. 02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	-			2 kali	2 kali	53.203.60 0,00	53.203.60 0,00	39.299.10 0,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Masyaraka t Kota Blitar		82.654.42 5,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	2	0 9	0 4	2. 02	00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Laporan	2 Laporan	53.203.60 0,00	53.203.60 0,00	39.299.10 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			82.654.42 5,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
4	2	0 9	0 5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar				100 Persen	100 Persen	10.249.70 0,00	10.249.70 0,00	14.235.00 0,00							14.586.07 5,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompo k	2 Kelomp ok	86.227.50 0,00	86.227.50 0,00	88.515.90 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			86.280.41 0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2	0	2.	00	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompo k	10 Kelomp ok	52.147.80 0,00	52.147.80 0,00	49.909.40 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			42.542.70 7,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2	0	2.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	-			5 Persen	5 Persen	160.738.6 00,00	160.738.6 00,00	155.692.3 56,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Pembudid aya ikan Kota Blitar		260.194.2 98,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokume n	1 Dokume n	5.787.800, 00	5.787.800, 00	3.627.800, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			6.077.410, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	119.996.2 00,00	119.996.2 00,00	117.842.5 56,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			203.718.1 18,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	3	2	0	2.	00	10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																				
							Jumlah Pembudidaya yang Diperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				40 Unit	50 Unit	34.954.60 0,00	34.954.60 0,00	34.222.00 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			50.398.77 0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN				
6	3	2	0				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan				34918 Juta Rupiah	38018 Juta Rupiah	110.974.3 00,00	110.974.3 00,00	99.611.10 0,00							151.794.3 66,00				
	3	2	0	2.			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	-			34.78 Persen	34.78 Persen	25.622.20 0,00	25.622.20 0,00	18.439.20 0,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Kelompok Polahsar Kota Blitar		50.598.12 2,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN			
	3	2	0	2.	00	02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																				
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	25.622.20 0,00	25.622.20 0,00	18.439.20 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			50.598.12 2,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	8.821.700, 00	8.821.700, 00	5.103.100, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			23.000.00 0,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2 7	0 2	2. 04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	-			95.3 Persen	95.3 Persen	4.742.000, 00	4.742.000, 00	4.243.000, 00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Peternak Di Kota Blitar		6.257.062, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2 7	0 2	2. 04	00 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																	
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	4.742.000, 00	4.742.000, 00	4.243.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			6.257.062, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
8	3	2 7	0 3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik				69.7 Persen	70.7 Persen	675.837.2 92,00	640.233.2 92,00	1.032.418. 992,00							1.989.364. 412,00	
	3	2 7	0 3	2. 01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	-			100 Persen	100 Persen	98.050.00 0,00	69.946.00 0,00	13.000.00 0,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Petani di Kota Blitar		99.775.68 1,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2 7	0 3	2. 01	00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	84.400.00 0,00	2.200.000, 00	2.200.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			6.655.869, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	203.750.0 00,00	203.750.0 00,00	441.500.0 00,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			1.093.955. 625,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN	
	3	2 7	0 3	2. 02	00 15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				3 Unit	3 Unit	185.012.2 00,00	177.512.2 00,00	168.412.2 00,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			397.913.5 96,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN	
9	3	2 7	0 4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani				100 61.11 48 Persen Persen Persen	65 48 100 Persen Persen Persen	241.123.7 00,00	240.916.7 00,00	229.588.7 00,00							341.390.9 59,00		
	3	2 7	0 4	2. 01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	-			0 Angka	0 Angka	49.134.80 0,00	63.297.80 0,00	45.589.30 0,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Peternak dan Masyaraka t Kota Blitar Di Kota Blitar			78.418.38 6,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2 7	0 4	2. 01	00 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah kader zoonosis				42 Orang	42 Orang	49.134.80 0,00	63.297.80 0,00	45.589.30 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			78.418.38 6,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2 7	0 4	2. 03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	-			90 Persen	90 Persen	153.696.3 00,00	139.326.3 00,00	148.592.7 00,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Peternak dan Masyaraka t Kota Blitar Di Kota Blitar		229.300.0 11,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2 7	0 4	2. 03	00 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																	
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				1 Laporan	1 Laporan	26.812.10 0,00	26.812.10 0,00	25.679.50 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			38.669.38 7,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2 7	0 4	2. 03	00 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																	
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				5 Laporan	5 Laporan	126.884.2 00,00	112.514.2 00,00	122.913.2 00,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			190.630.6 24,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2 7	0 4	2. 04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	-			88 Persen	89.14 Persen	27.264.70 0,00	27.264.70 0,00	25.930.00 0,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Peternak dan Masyaraka t Kota Blitar Di Kota Blitar		27.840.92 8,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN
	3	2 7	0 4	2. 04	00 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																	
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokume n	1 Dokume n	8.811.000, 00	8.811.000, 00	8.811.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan			9.799.047, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		Ekonomi Digital				PERTANI AN			
	3	2	0	2.	00	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																			
							Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	18.453.70 0,00	18.453.70 0,00	17.119.00 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			18.041.88 1,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN		
	3	2	0	2.		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	-			100 Persen	100 Persen	11.027.90 0,00	11.027.90 0,00	9.476.700, 00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Peternak dan Masyaraka t Kota Blitar Di Kota Blitar		5.831.634, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN		
	3	2	0	2.	00	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																			
							Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				8 Unit	8 Unit	11.027.90 0,00	11.027.90 0,00	9.476.700, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			5.831.634, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN		
10	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur				100 Persen	100 Persen	17.675.00 0,00	17.675.00 0,00	17.675.00 0,00							111.206.6 67,00			
	3	2	0	2.		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	-			17 Persen	17 Persen	17.675.00 0,00	17.675.00 0,00	17.675.00 0,00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Petani di Kota Blitar		111.206.6 67,00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN		
	3	2	0	2.	00	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	17.675.00 0,00	17.675.00 0,00	17.675.00 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			111.206.6 67,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	3	2	0	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis			-	42.85 Persen	18.124.30 0,00	18.124.30 0,00	6.352.100, 00							93.730.59 2,00	
	3	2	0	6	2. 01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	-		-	57 pelaku usaha	7.649.400, 00	7.649.400, 00	1.375.000, 00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Masyarakat Kota Blitar		82.707.30 0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	6	2. 01	00 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.649.400, 00	7.649.400, 00	1.375.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			82.707.30 0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	6	2. 02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang dikeluarkan	-		-	1 rekomendasi	5.524.300, 00	5.524.300, 00	3.487.200, 00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Masyarakat Kota Blitar		5.688.921, 00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	2	0	2.	00 02		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan																		
							Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi					2 Laporan	2 Laporan	5.524.300, 00	5.524.300, 00	3.487.200, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			5.688.921, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN	
	3	2	0	2.			Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	-			1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	4.950.600, 00	4.950.600, 00	1.489.900, 00			-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital	Masyaraka t Kota Blitar		5.334.371, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN	
	3	2	0	2.	00 02		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi					1 Laporan	1 Laporan	4.950.600, 00	4.950.600, 00	1.489.900, 00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			5.334.371, 00	DINAS KETAHA NAN PANGA N DAN PERTANI AN	
12	3	2	0				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase rata- rata peningkatan nilai kelas kelompok tani Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis				33.33 0.93 19.05 Persen Persen Persen	2 41.6 19.05 Persen Persen Persen	1.561.272. 200,00	1.959.568. 490,00	1.961.778. 490,00							2.101.378. 641,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	16 Orang	0,00	0,00	72.960.00 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Penyulu h Pertanian	-	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital			75.000.00 0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
								J U M L A H						12.934.32 7.468,00	13.122.15 0.527,00	13.283.80 0.088,00						16.498.34 0.764,00	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangann terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi. Perubahan Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam tiga triwulan kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
Pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 menyesuaikan anggaran yang tersedia.
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
 - a. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025 serta diselaraskan dengan P-RKPD Kota Blitar tahun 2025 ;
 - b. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (PRKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar tahun 2025 ;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025 .
3. Rencana Tindak Lanjut
Perubahan Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar.